

**MANAJEMEN ASET IRIGASI UNTUK MENUNJANG
OPERASI DAN PEMELIHARAAN DI DAERAH IRIGASI
KOTO TUO KOTA PADANG**

OLEH :

VEDRI RAHMADHANO
06 118 050



**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**MANAJEMEN ASET IRIGASI UNTUK MENUNJANG OPERASI DAN
PEMELIHARAAN DI DAERAH IRIGASI KOTO TUO
KOTA PADANG**

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Manajemen Aset Irigasi untuk Menunjang Operasi dan Pemeliharaan di Daerah irigasi Koto Tuo Kota Padang" telah dilaksanakan pada jaringan irigasi Koto Tuo bagian Kiri, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto dan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang pada bulan Mei sampai Juli 2010. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan manajemen aset sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan operasi dan pemeliharaan di daerah irigasi Koto Tuo kota Padang.

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pengumpulan dan penelaahan data sekunder, pengumpulan data primer (penelusuran jaringan dan pengamatan di lapangan), pengolahan serta analisis data. Data sekunder yang dibutuhkan adalah skema jaringan irigasi, data yang terkait dengan organisasi P3A. Sedangkan data primer adalah data kondisi aset fisik jaringan irigasi dan lembaga P3A, perhitungan 5 karakteristik fisik jaringan irigasi, yaitu : kerapatan saluran dan bangunan, beta, eta, dan theta ratio serta data kecepatan aliran serta debit pada saluran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bangunan (aset fisik) pada jaringan irigasi Koto Tuo bagian Kiri berada pada kondisi kerusakan sedang dengan nilai kerusakan 52,63 % (10 unit) dari total keseluruhan bangunan yang ada (19 unit), organisasi P3A berada pada kondisi yang tidak aktif dan kurang berfungsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi P3A dengan persentase keaktifan 10 %. Dari analisa karakteristik jaringan irigasi yang meliputi kerapatan saluran dan bangunan, beta, eta, dan theta ratio didapatkan, nilainya masih dibawah standar yang ditetapkan. Sementara, nilai efisiensi jaringan irigasi sebesar 0,4927 (49 %) lebih rendah dari standar Dirjen Pengairan (1986) yaitu 0,64 (64 %). Mengacu pada KP-01 (1986), jika efisiensi jaringan 25-50 % maka jaringan irigasi berada pada kerusakan sedang. Perhitungan perkiraan biaya prioritas perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset irigasi Koto Tuo Kiri yang mengalami kerusakan adalah sebesar Rp 36.054.780.

Kata kunci : irigasi, manajemen aset, operasi dan pemeliharaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Irigasi merupakan suatu usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang aktivitas pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Irigasi bertujuan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal sehingga akan tercipta ketahanan pangan nasional (PP No. 20 tahun 2006).

Mengingat pentingnya peranan air irigasi dalam usaha meningkatkan produksi pertanian, perlu kiranya diusahakan penyempurnaan cara-cara operasi dan pemeliharaan irigasi guna tercapainya keberlanjutan fungsi sistem irigasi. Keberlanjutan fungsi irigasi sangat tergantung kepada bagaimana sistem pengelolaan irigasi tersebut pasca pembangunannya.

Sebelum diberlakukannya otonomi di kabupaten atau kota dan pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi yang diamanatkan dalam instruksi presiden No.3 Tahun 1993, wewenang pengelolaan irigasi sepenuhnya berada pada pemerintah pusat dan propinsi. Sehingga dengan demikian, kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi serta dana untuk setiap kegiatan operasi dan pemeliharaan selalu tersedia dengan cukup yang dianggarkan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada sistem yang sentralistik ini peran dan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan tidak ada.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 1999 tentang pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi yang memuat 5 (lima) isi pokok sebagai berikut : (i) Redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, (ii) Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, (iii) Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A, (iv) Pembiayaan operasional dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi melalui IPAIR, dan (v) keberlanjutan sistem irigasi, yang merupakan realisasi dari undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah yang intinya memberikan otonomi kepada daerah dan masyarakat mengenai wewenang pengelolaan jaringan irigasi, sehingga dengan

demikian dana untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilimpahkan pada pemerintah daerah yang bersangkutan dan kepada masyarakat petani pemakai air.

Dengan dilimpahkannya pengelolaan jaringan irigasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat petani pemakai air, akan mengakibatkan semakin berkurangnya anggaran untuk biaya operasi dan pemeliharaan irigasi yang dilakukan setiap tahunnya. Selain itu, minimnya anggaran untuk operasi dan pemeliharaan juga akibat dari kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat petani dalam menerapkan IPAIR.

Minimnya ketersediaan anggaran pemerintah setiap tahunnya, baik untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan maupun anggaran penanggulangan kerusakan jaringan irigasi yang terjadi karena bencana alam, lamanya pemakaian dan umur teknis bangunan maka akan berdampak pada buruknya kondisi jaringan irigasi (aset) disamping itu juga akan berisiko pada menurunnya kinerja jaringan irigasi serta tidak optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Lemahnya operasi dan pemeliharaan irigasi juga disebabkan menurunnya tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pengelola irigasi. Seperti P3A, dinas yang membidangi irigasi, dan komisi irigasi, sehingga ketika terjadi permasalahan dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi, lembaga pengelola sangat lamban dalam mengatasinya. Disamping itu peraturan pemerintah dan UU yang mengatur O&P jaringan irigasi seringkali penerapannya tidak terlaksana di lapangan.

Penyebab lain adalah tidak optimalnya penggunaan barang (aset) irigasi oleh lembaga pengelola, nilai pemanfaatannya tidak seimbang dengan nilai dan potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Data yang menunjukkan kondisi dari aset irigasi juga tidak terkelola dengan baik, yang dibuktikan dengan banyak aset irigasi yang mengalami penurunan fungsi, tidak terawat dan terpelihara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pendekatan manajemen aset sangat diperlukan dalam menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan irigasi. Dengan pengelolaan aset irigasi yang baik, maka nilai dan fungsi dari aset itu akan dapat di optimalkan serta ditingkatkan. Pelaksanaan manajemen aset merupakan implementasi dari PP No. 20 tahun 2006.

Manajemen aset sendiri dibagi dalam 4 tahapan kerja yaitu (i) Inventarisasi aset yang meliputi inventarisasi aspek fisik terdiri atas bentuk, luas

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian mengenai manajemen aset di irigasi koto tuo ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Kondisi aset fisik irigasi Koto Tuo Kiri berada dalam kerusakan sedang dengan nilai kerusakan 52,63 % (10 unit bangunan dari total 19 unit bangunan) yang meliputi bangunan sadap, bangunan bagi, pintu air dan aset fisik pendukung lainnya. Kerusakan aset fisik pada Irigasi Koto Tuo kiri disebabkan karena kurangnya operasi dan pemeliharaan, kerusakan alami dan kerusakan yang disebabkan oleh petani.
2. Aset lembaga pengelola irigasi ditingkat petani yaitu organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ada pada DI Koto Tuo Kiri berada pada kondisi yang tidak berfungsi serta tidak aktif dalam menjalankan tugas, kerja dan tanggung jawab organisasi P3A.
3. Dari analisa karakteristik jaringan yang dilakukan pada irigasi Koto Tuo Kiri yang meliputi kerapatan saluran, kerapatan bangunan, bheta ratio, theta ratio, eta ratio dan theta ratio didapatkan hasil yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga pendistribusian air tidak merata.
4. Nilai Efisiensi jaringan irigasi Koto Tuo Kiri sangat rendah yaitu 49 % tidak sesuai dengan nilai Efisiensi jaringan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengairan 64 %. Ini menunjukkan bahwa kondisi jaringan irigasi Koto Tuo Kiri berada pada kerusakan sedang.
5. Dari perhitungan biaya prioritas perbaikan aset irigasi Koto Tuo Kiri yang mengalami kerusakan didapatkan total biaya keseluruhan prioritas perbaikan sebesar Rp 36.054.780.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. 2003. Kincir Air untuk Irigasi. Yayasan Hutanku. Padang.
- Anonim. 2002. Laporan Akhir : Pengembangan dan Implementasi Program PMA Prasarana Irigasi. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Arif, S.S. 1996. Ketidaksesuaian Rancang Bangun Jaringan Irigasi di Tingkat Tersier dan Akibatnya Terhadap Pelaksanaan Program Penganekaragaman Tanaman (Crop Diversification) : Studi Kasus di Daerah Irigasi (DI) Cikuesik, Cirebon.
- Arif, S.S., Prabowo, Puryanto., dan Djito.2006. Pengembangan Konsep Sistem Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Daerah Irigasi Multiguna Dengan Membangun Komitmen Untuk Berbuat Konsesus Antar Pelaku : Sebuah Kasus di Jawa timur.
<http://www.air.ejournal.unud.ac.id> [20 November 2009]
- Arif, S.S. 2006. Operasi dan Pemeliharaan masa depan: sebuah gagasan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dan lingkungan. Jurnal Agritech. Vol. 26 (3) 2006. p136-144. <http://acadstaff.ugm.ac.id>[15 Februari 2010]
- [Dirjen Pengairan dan Departemen Pekerjaan Umum]. 1986. *Standar Perencanaan Irigasi KP-01*. Galang Persada. Bandung.
- Gandakoesomah. 1975. *Irigasi*.Bandung. Sumur Bandung.
- Hansen, V.E., Israelsen, and Stringham. 1986. *Dasar – Dasar Praktek Irigasi*. Erlangga. Jakarta.
- Huppert, W., and Walker, H. H. 1989. Management of irrigation System. Technical. *Technical Cooperation*. Federal Republic of Germany. Eschborn.
- Japan International Cooperation Agency (JICA). 2008. Modul Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Jakarta. Dinas PU Pengairan.
- Kartasapoetra, A.G. 1994 *Teknologi Pengairan Pertanian Irigasi*. Ed ke 2. Jakarta. Bumi Aksara.
- Modul Pengelolaan Aset Irigasi. 2008. Jakarta. Dinas PU Pengairan.
- Purwoto.1998. Perubahan Manajemen Sumberdaya Air dan Investasi Menunjang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Kerjasama The Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi.Bogor.